

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB sudah dapat menggantikan pengaduan secara manual dan verifikasi data dengan cepat dan akurat.
3. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB dapat mencetak hasil laporan dari keseluruhan pengadu yang melakukan Pengaduan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penyusun mengemukakan beberapa saran agar program aplikasi ini lebih baik lagi

1. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB ini masih belum sempurna dan agar lebih disempurnakan lagi.
2. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB agar lebih diperluas lagi pengembangan sistemnya.
3. Program Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Jatim Berbasis WEB agar bisa kedepannya dilengkapi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
2011, Himpunan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
,Yogyakarta

Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja, 2008, Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja
Antar Kerja Antar Daerah, Jakarta

Undang – Undang

Undang – undang Nomor 3 Tahun 1951. tentang Pernyataan Berlakunya Undang
– Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1951 Nomor 4)

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan
Diperusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201)

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 05/MEN/IV/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 230/MEB/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Internet :

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

"Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja AKAD", *Slideshare*

http://new.infokerja-jatim.com/index.php/baca/penempatan_akd, diunduh tanggal 18 Maret 2014 pukul 09.00 WIB